
Implementasi Kebijakan SDGs Pemerintah Daerah dalam Mengelola Ketahanan Pangan pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Pandak, Kec. Baturaden, Kab. Banyumas)

Arief Bakhtiar Darmawan

Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Jenderal Soedirman
email: arief.darmawan@unsoed.ac.id

Afina Rachma Sulistyaning

Jurusan Ilmu Gizi, Universitas Jenderal Soedirman
email: afina.sulistyaning@unsoed.ac.id

Joko Santoso

Jurusan Sosiologi, Universitas Jenderal Soedirman
email: joko.santoso@unsoed.ac.id

Tundjung Linggarwati

Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Jenderal Soedirman
email: tundjung.el@unsoed.ac.id

Kholifatus Saadah

Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Jenderal Soedirman
email: kholifatus.saadah@unsoed.ac.id

Rahmad Agus Dwianto

Program Studi Ilmu Manajemen, Universitas Teknologi Yogyakarta
email: rahmadagusdwiantouty@gmail.com

Dikirim; 14-08-2023 Direvisi; 31-08-2023 Diterima: 31-08-2023

ABSTRACT

This research aims to observe the condition of food security in Pandak Village, Baturaden District, Banyumas Regency, during the Covid-19 pandemic. Researchers also seek to analyze how the village government manages food security, the second goal in the Village Sustainable Development Goals (SDGs). The Covid-19 pandemic has made it difficult for the government to increase economic growth and meet the Village SDGs targets. Village government strategies are analyzed using Geoff Mulgan's strategy model, which uses systematic interrelated points: goals and directions, environment, action, and learning.

The author uses mixed method with qualitative data collection methods (interviews and focus group discussions) and quantitative data (questionnaires). Qualitative data collection techniques were conducted through

in-depth interviews with Pandak Village officials, while focus group discussion techniques presented several stakeholders related to the village and the SDGs. Quantitative data collection techniques to assess food security use the Household Food Security (HFS) questionnaire, while the Dietary Diversity Score (DDS) questionnaire is used for food diversity.

The results showed that Pandak Village's strategy for managing food security could have been more optimal. Pandak Village Government has shown the right strategy in setting goals and directions, managing the environment, and taking various actions. However, from a learning point of view, the authors found that Pandak Village still needs to increase family income, educate on improving nutrition, promote healthy parenting on the issue of food security.

Keywords: *Covid-19 Pandemic; Food Security; Pandak Village; Sdgs.*

ABSTRAK

Penelitian ini berusaha mengamati kondisi ketahanan pangan di Desa Pandak, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, pada masa pandemi Covid-19. Peneliti juga berupaya menganalisis bagaimana pemerintah desa mengelola ketahanan pangan yang menjadi tujuan kedua dalam tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa. Pandemi Covid-19 telah membuat pemerintah kesulitan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memenuhi target-target SDGs Desa. Strategi pemerintah desa dianalisis menggunakan model strategi Geoff Mulgan melalui poin-poin sistematis yang saling berkaitan, yaitu tujuan dan arah, lingkungan, tindakan, serta pembelajaran.

Penulis menggunakan metode pendekatan campuran dengan pengambilan data kualitatif (wawancara dan *focus group discussion*) dan data kuantitatif (kuesioner). Teknik pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam kepada perangkat Desa Pandak, sementara teknik *focus group discussion* menghadirkan beberapa pemangku kebijakan yang terkait dengan desa dan SDGs. Teknik pengumpulan data kuantitatif untuk menilai ketahanan pangan menggunakan kuesioner *Household Food Security* (HFS), sementara untuk keragaman pangan menggunakan kuesioner *Dietary Diversity Score* (DDS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Desa Pandak dalam mengelola ketahanan pangan belum sepenuhnya optimal. Pemerintah Desa Pandak telah menunjukkan strategi yang tepat dalam menempatkan tujuan dan arah, mengelola lingkungan, serta melakukan berbagai tindakan. Namun, dari sisi pembelajaran, penulis menemukan bahwa Desa Pandak masih perlu peningkatan pendapatan keluarga, edukasi perbaikan gizi, serta sosialisasi pola asuh yang sehat dalam isu ketahanan pangan.

Kata kunci: *Desa Pandak; Ketahanan Pangan; Pandemi Covid-19, Sdgs.*

PENGANTAR

Pemerintah telah menetapkan pandemi yang disebabkan oleh *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Kondisi ini berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan pemerintah di daerah hingga di tingkat desa, karena dampak yang sangat luas dan saling terkait antara kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Penurunan angka kesehatan masyarakat dapat menghambat ketercapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) global dari segi

tujuan kedua, yaitu “mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan” (Kementrian PPN/Bappenas RI, 2023). Program untuk memperkuat hasil SDGs adalah SDGs Desa. SDGs Desa adalah upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang disusun dalam konteks pedesaan sebagai wilayah yang khas Indonesia.

Dalam SDGs Desa poin kedua, tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi isu-isu ketahanan pangan. Ketika SDGs Desa dirumuskan, unsur ketahanan pangan tidak hilang, tetapi terus diperkuat di tingkat desa, wilayah dan struktur pemerintahan paling akhir di Indonesia yang langsung berhubungan

dengan masyarakat. Ketahanan pangan merupakan isu yang penting pada masa Covid-19, karena dampak ekonomi membuat pendapatan untuk membeli kebutuhan pangan turun. Setiap orang membutuhkan makanan untuk menopang hidupnya dan untuk mendapatkan status gizi yang baik. Dampak penurunan kondisi sosial ekonomi dapat berpengaruh terhadap ketersediaan dan ketahanan pangan dalam rumah tangga (*household food security*) akibat menurunnya daya beli masyarakat.

Penurunan ketahanan pangan dapat berakibat secara langsung pada menurunnya angka kesehatan anggota keluarga akibat kondisi kerawanan pangan dan konsumsi makanan yang kurang variatif dari segi kandungan gizi. Kajian UNICEF menyatakan bahwa jumlah anak yang memiliki status gizi kurus (*wasted*) diprediksi akan meningkat sebanyak 15 persen atau 7 juta di seluruh dunia pada tahun pertama pandemi Covid-19 apabila tidak ada upaya yang memadai dan tepat waktu. Setiap satu persen penurunan produk domestik bruto (GDP) global, meningkatkan jumlah anak *stunting* sebanyak 0,7 juta di seluruh dunia. Di Kabupaten Banyumas, dampak COVID-19 terhadap status gizi balita sudah mulai terlihat berdasarkan data pemantauan status gizi bayi dan balita yang hasilnya masih fluktuatif. Berdasarkan laporan Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (2019; 2020; 2021; 2022), balita dengan status gizi kurus (*wasted*) berdasarkan pengukuran berat badan menurut tinggi/panjang badan (BB/TB atau BB/PB) sebanyak 4,7% (2019), 3,9% (2020), 4,3% (2021), dan 5,7% (2022). Balita dengan status berat badan kurang menurut indikator berat badan dan umur (BB/U), adalah sebanyak 88,5% (2019), 6,6% (2020), 8,1% (2021), dan 9,7%

(2022). Salah satu penyebab kondisi ini dapat merupakan dampak dari penurunan pendapatan keluarga. Pada masa pandemi, sebanyak 1.222 pekerja dari 54 perusahaan di Kabupaten Banyumas mengalami pemutusan kerja karena perusahaan terdampak COVID-19 (Antara News, 2020).

Berbagai kondisi tersebut berpotensi membuat ketahanan pangan rumah tangga di desa berada pada situasi mengkhawatirkan. Ketahanan pangan rumah tangga memiliki beberapa definisi. Sesuai dengan International Congress of Nutrition tahun 1992 di Roma, ketahanan pangan rumah tangga didefinisikan sebagai “kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggotanya dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari” (FAO & WHO, 1992). Ketahanan pangan rumah tangga tercapai ketika semua orang yang tinggal dalam rumah tangga tersebut memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi ke makanan yang cukup, aman, dan bergizi setiap saat, untuk memenuhi kebutuhan makanan dan preferensi makanan hidup aktif dan sehat (FAO, 2008). Di level nasional, Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. UU RI No. 18 tahun 2012 juga mengadopsi FAO (1996) untuk menjelaskan empat faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan, yang meliputi kecukupan ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan, aksesibilitas

terhadap pangan serta kualitas/keamanan pangan. Dari beragam definisi tersebut, penulis memahami ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup. Karena balita belum bisa memenuhi kebutuhan makan atau gizi sendiri, maka orang tua memegang peranan penting dalam terwujudnya ketahanan pangan.

Beberapa literatur terdahulu menunjukkan bahwa ketahanan pangan berkaitan erat dengan faktor lain, seperti asupan gizi dan partisipasi lingkungan. Menurut penelitian Arlius (2017), ketahanan pangan dan status gizi balita mempunyai hubungan yang erat karena kekurangan pangan akan mempengaruhi status gizi suatu keluarga. Peneliti lainnya, misalnya Pratama, Witjaksono, & Raya (2022), Zulkifli (2022), dan Khomsan, Riyadi, & Marliyati (2013) memperlihatkan bahwa ketahanan pangan perlu didukung partisipasi lembaga negara dan kelompok masyarakat. Dari beberapa penelitian tersebut, penelitian mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap ketahanan pangan rumah tangga masih belum banyak dilakukan di wilayah Kabupaten Banyumas. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis strategi yang disusun dalam situasi darurat seperti pandemi Covid-19. Penelitian ini penting karena wabah atau krisis global bisa terjadi sewaktu-waktu dan sulit untuk ditebak kecepatan penyebarannya. Dengan adanya penelitian ini, kita bisa menggali dan menerapkan strategi dan kebijakan yang diperlukan untuk merespons wabah atau krisis di masa depan. Selain itu, sangat jarang penelitian yang menggabungkan antara bidang ilmu sosial dan ilmu gizi dalam isu ketahanan pangan. Oleh karena itu, penelitian

ini bisa menjadi jalan atau inisiatif awal untuk menghasilkan kolaborasi serupa. Kolaborasi antara dua bidang ilmu atau lebih merupakan terobosan penting untuk menangani persoalan di masyarakat secara lebih komprehensif.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, pertanyaan yang mendasari penelitian ini adalah bagaimana strategi Desa Pandak dalam mengelola ketahanan pangan masyarakat di masa pandemi Covid-19 sebagai bentuk implementasi kebijakan SDGs. Desa Pandak menjadi fokus penelitian ini karena merupakan salah satu wilayah yang memiliki sumber pendapatan asli desa yang memadai. Dengan anggaran khas desa yang besar, pemerintah Desa Pandak diharapkan memiliki strategi yang efektif dan mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan paling mendasar, yaitu mengenai ketahanan pangan.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis menggunakan metode campuran, yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada narasi dengan deskripsi yang rinci, lengkap, dan mendalam tentang situasi nyata atau aktual untuk mendukung penyajian data. Di sini, penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui strategi pemerintah desa dan persepsi masyarakat terhadap ketahanan pangan dalam kerangka program SDGs Desa. Penulis menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) pada 11 Oktober 2022 dengan topik ketahanan pangan di desa. FGD tersebut menghadirkan perwakilan Dinas Sosial dan Pembangunan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Bambang Junaedi, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa Kabupaten Banyumas Imanuddin, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten

Banyumas Indra Purnomo, Sekretaris Satria Praja Bambang Suharsono, dan beberapa perwakilan Desa Pandak. Di Desa Pandak, Penulis mendalami isu dengan mewawancarai Kepala Desa Pandak Rujito pada 14 September 2022.

Secara bersamaan, dalam penelitian ini, penelitian kuantitatif digunakan untuk menganalisis ketahanan pangan masyarakat Desa Pandak. Tolak ukur ketahanan pangan yang diteliti adalah keragaman pangan, pola asuh, serta status gizi rumah tangga. Sesuai definisi ketahanan pangan, keempat hal tersebut saling terkait satu sama lain. Populasi target adalah seluruh bayi dan balita usia 0-59 bulan beserta orang tua di Kabupaten Banyumas. Populasi terjangkau penelitian adalah bayi dan balita usia 6-59 bulan beserta ibu di Desa Pandak, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Dari populasi tersebut, dipilih secara acak sebanyak 32 responden ibu dan balita yang mengalami *stunting* dan tidak *stunting* di Desa Pandak pada bulan Juli-September 2022, ketika pandemi Covid-19 masih dinyatakan berlangsung, dengan menggunakan teknik penarikan sampel acak sederhana tanpa pemulihan. Pengambilan data diawali dengan *informed consent* oleh responden ibu apabila setuju mengikuti penelitian ini. Setelah mendapat persetujuan responden, peneliti melakukan skrining subyek dengan melakukan konsultasi bersama bidan desa. Untuk ketahanan pangan, penulis menggunakan kuesioner *Household Food Insecurity Access Scale* (HFIAS) yang dimodifikasi, sementara untuk keragaman pangan, penulis menggunakan kuesioner *Dietary Diversity Score* (DDS), serta untuk pola asuh menggunakan kuesioner Pola Asuh Makan Anak. Status gizi dianalisis dengan mengukur tinggi badan dan berat

badan responden balita. Pengisian kuesioner dilakukan dengan metode wawancara kepada ibu yang memiliki bayi dan balita usia 6-59 bulan.

Hasil kuesioner kemudian menjadi variabel yang diteliti, berupa skor ketahanan pangan, keragaman pangan, pola asuh makan, dan status gizi. Variabel ketahanan pangan dikategorikan menjadi tahan pangan dan rawan pangan, keragaman pangan dikategorikan menjadi baik dan kurang, pola asuh makan dikategorikan menjadi tepat dan kurang tepat, serta status gizi dikategorikan menjadi normal dan di bawah normal (*underweight*). Hubungan antarvariabel diuji menggunakan uji *chi square* dan diolah menggunakan *software* SPSS (IBM, SPSS Inc.) for Mac versi 25.0.

PEMBAHASAN

Penulis memulai hasil dan pembahasan mengenai isu ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas, sekaligus persepsi para pemangku kebijakan mengenai SDGs Desa, terutama poin kedua. Penulis kemudian melanjutkan pada hasil identifikasi ketahanan pangan di Desa Pandak, dan analisis relasi ketahanan pangan, keragaman pangan, dan pola asuh Desa Pandak. Terakhir, penulis membahas mengenai strategi Desa Pandak untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayahnya.

Pemahaman Para Pemangku Kebijakan Kabupaten Banyumas terhadap SDGs Poin Kedua

SDGs merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan dengan mengacu pada hak asasi manusia dan kesetaraan. Dalam konteks SDGs Desa, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa adalah pemain

kunci dalam pencapaian Agenda 2030 atau disebut juga *Sustainable Development Goals* (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Desa memberikan kontribusi sekitar 74% dari total penilaian SDGs di Indonesia (Iskandar, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketahanan pangan dan perbaikan gizi balita di Desa Pandak, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas dalam konteks SDGs, sebagai bagian dari upaya mendeteksi penurunan status kesehatan anggota keluarga akibat dari penurunan kondisi sosial ekonomi dampak pandemi Covid-19.

Pangan dan gizi merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Selama ini, Kabupaten Banyumas menjadi daerah dengan kemiskinan ekstrem tertinggi di Jawa Tengah (Zain, 2021). Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketika pengeluaran di bawah Rp10.739 per kapita per hari atau Rp322.170 per kapita per bulan (Andryanto, 2023). Pada tahun 2021, angka kemiskinan ekstrem di Banyumas mencapai 635.300 orang, dan menurun pada tahun 2022 menjadi 239.100 orang. Pada tahun 2022, kemiskinan ekstrem tertinggi di Kabupaten Banyumas ada di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Wangon, Kecamatan Cilongok dan Kecamatan Pekuncen. Masing-masing kecamatan memiliki lima desa yang tergolong dalam kemiskinan ekstrem (Pamuji, 2022).

Melihat data di atas, penguatan ketahanan pangan dan gizi sebagai implementasi SDGs nomor dua seharusnya menjadi perhatian penting di Kabupaten Banyumas. Di level masyarakat, isu ketahanan pangan masih menyimpan beberapa persoalan. Sebagai contoh, menurut Sekretaris Satria Praja

Bambang Suharsono (FGD, 2022), pertama, lumbung pangan desa telah berubah fungsi. Fungsi lumbung pangan desa adalah untuk mengatasi paceklik. Tapi saat ini, banyak lumbung pangan yang kosong karena zaman sudah berubah. Kelebihan pangan tidak disimpan di lumbung, tetapi segera dijual untuk kegiatan lingkungan dan masyarakat. Kedua, masyarakat selalu ingin membangun jalan sebagai salah satu infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi. Padahal, ketahanan pangan dan gizi juga merupakan program penting bagi masyarakat. Masalah ketiga, menurut perwakilan Dinsospermades Kabupaten Banyumas Bambang Junaedi (FGD, 2022), tiap dusun dan desa memiliki kelebihan pangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemerintah memang sebaiknya menerapkan kebijakan *mapping* untuk produksi, seperti dusun atau desa penghasil pisang, jagung, dan sebagainya.

Para pemangku kebijakan sendiri sepakat bahwa SDGs merupakan hal yang penting. Menurut Bambang Suharsono (FGD, 2022), bidang-bidang atau implementasi dalam SDGs maupun SDGs Desa sebenarnya telah dilakukan sejak dulu. Hanya saja, menurut Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas Indra Purnomo (FGD, 2022), pola pikir kepala desa mengenai SDGs Desa harus dipertegas, sehingga mereka juga bisa meyakinkan masyarakat bahwa penguatan ketahanan pangan dan gizi sama pentingnya dengan pembangunan jalan. Para kepala desa menginginkan adanya arahan dan indikator yang jelas. Indra Purnomo menjelaskan,

“Yang diinginkan pemerintah adalah ada arahan yang jelas dengan indikator yang jelas. Untuk mengurangi kemiskinan, indikatornya apa. Oleh karena itu, SDGs sangat membantu kades dan perangkat desa di dalam merencanakan suatu rencana

Arief Bakhtiar Darmawan, Afina Rachma Sulistyoning, Joko Santoso, Tundjung Linggarwati, Kholifatus Saadah, Rahmad Agus Dwianto -- Implementasi Kebijakan SDGs Pemerintah Daerah dalam Mengelola Ketahanan Pangan pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Pandak, Kec. Baturaden, Kab. Banyumas)

kerja, RKP (Rencana Kerja Pemerintah) atau RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa. Sebab, perencanaan kegiatan perlu hasil dari output SDGs sebelumnya. Masyarakat dan kades banyak yang belum paham betul mengenai SDGs, indikatornya di lapangan masih kabur.”

Dengan adanya SDGs Desa, para kades bisa mengambil inisiatif yang mungkin tidak terpikirkan oleh masyarakat, seperti kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk program produksi pangan kambing untuk para bapak dan program pemanfaatan tanaman pekarangan untuk para ibu. Sejalan dengan itu, Bambang Junaedi (FGD, 2022) juga menyatakan bahwa desa memerlukan indikator sehingga bisa mencari data di lapangan dan menganalisis persoalan dengan lebih tepat:

“Desa memerlukan data mikro apa yang dibutuhkan. Stunting itu indikatornya banyak, tidak bisa hanya dilihat dari pola makan dan rumah. Ada faktor seperti pola asuh, kualitas air bersih yang dikonsumsi, dan sebagainya. Di lapangan, hal-hal seperti itu terjadi.”

Dengan indikator yang ada, menurut TPP Desa Kabupaten Banyumas yang juga Pendamping Desa Pandak Imanuddin (FGD, 2022), desa bisa menghitung kebutuhan per orang untuk pangan dan gizi sesuai standar SDGs, yaitu sebesar 1100 kalori per kapita per hari. Dari situ, desa bisa menghitung kebutuhan dan kemampuan desa untuk memenuhi ketahanan pangan masyarakat.

Kepala Desa Pandak Rujito (2022) menyatakan bahwa desa membutuhkan arahan seperti yang tercantum dalam SDGs:

“Dalam konteks pembangunan desa... saat ini dibutuhkan arahan pembangunan yang lebih sesuai kondisi lapangan, yaitu yang detil atau mikro, mencakup aspek metode, substansi, dan tujuan akhir, serta tertuju

pada kawasan yang sangat kecil, sampai pada pemanfaat keluarga atau individu. Sustainable Development Goals (SDGs) berposisi mengisi segenap kebutuhan tersebut. SDGs menggabungkan seluruh konsep pembangunan yang pernah disusun manusia, sebagai konperensi tingkat tinggi yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) selama ini.”

Sebelum adanya SDGs Desa, desa memang telah melakukan berbagai program untuk masyarakat. Namun, program-program yang dilakukan belum terarah dan berkelanjutan. Dengan adanya SDGs Desa, Rujito (2022) menegaskan bahwa arah tujuan pembangunan desa bisa lebih terarah dan terukur untuk mewujudkan desa yang makmur dan mandiri, dengan melibatkan semua pihak di desa dan mengoptimalkan potensi yang ada. Dengan mengimplementasikan SDGs poin kedua dan menjadi desa yang makmur dan mandiri, maka Desa Pandak telah berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.

Dalam proses perencanaan desa, SDGs Desa diletakkan dalam visi dan misi kepala desa. Sesuai tabel 1, visi dan misi kepala desa terpilih kemudian dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) selama enam tahun. Tim RPJM Desa dibentuk oleh kepala desa terpilih, dan setelah terbentuk, memiliki tugas untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota dengan rencana pembangunan kawasan perdesaan. Dengan kata lain, RPJM Desa harus selaras dengan tujuan, target, dan indikator SDGs Desa. Dari sini, SDGs Desa dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Dari berbagai pendapat di atas, penulis melihat bahwa para pemangku kebijakan mengakui bahwa SDGs maupun SDGs

Tabel 1
Posisi SDGs Desa dalam Sistematisasi Tahapan Penyusunan RPJM Desa

Tahapan/Kegiatan	Hasil/Keluaran	Keterangan
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa	Terbentuknya tim yang beranggotakan 7-11 orang	Tim dibentuk oleh Kepala Desa dengan SK Kepala Desa
Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota	Data dan analisis: RPJMD kabupaten/kota; rencana strategis satuan kerja perangkat daerah; rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota; rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; rencana pembangunan kawasan perdesaan	Dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa, menyesuaikan tujuan, target, dan indikator SDGs Desa
Pengkajian keadaan desa	Penyelarasan data desa, penggalian gagasan masyarakat untuk melihat potensi dan masalah; penyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa	Tim Penyusun RPJM Desa
Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa (analisis data dan pelaporan data desa yang sudah diselenggarakan)	Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa; data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat	Tim Penyusun RPJM Desa
Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa	Berita acara penyusunan Rancangan RPJM Desa	BPD, Tim Penyusun RPJM Desa, masyarakat desa
Penyusunan rancangan RPJM Desa	Rancangan RPJM Desa yang mendapatkan persetujuan Kepala Desa	Tim Penyusun RPJM Desa
Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa	Rancangan RPJM Desa dibahas melalui musyawarah desa dan disepakati oleh peserta musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai RPJM Desa	BPD, Tim Penyusun RPJM Desa, masyarakat desa
Penetapan dan perubahan RPJM Desa	Rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa	Kades dan BPD

Sumber: Rujito, 2022.

Desa memberikan arah dan indikator yang penting bagi penguatan ketahanan pangan di desa. Namun, mereka juga mengakui bahwa pemerintah kurang tegas dalam menekankan target SDGs Desa kepada perangkat desa dan masyarakat. Desa Pandak sendiri memiliki visi dan misi soal ketahanan pangan sesuai tujuan dan target SDGs poin kedua. Meski demikian, Desa Pandak masih memiliki balita dengan stunting, sehingga pemerintah desa harus terus berupaya mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.

Analisis Ketahanan Pangan di Desa Pandak

Desa Pandak merupakan desa yang terletak di Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Desa Pandak berjarak 6,1 km

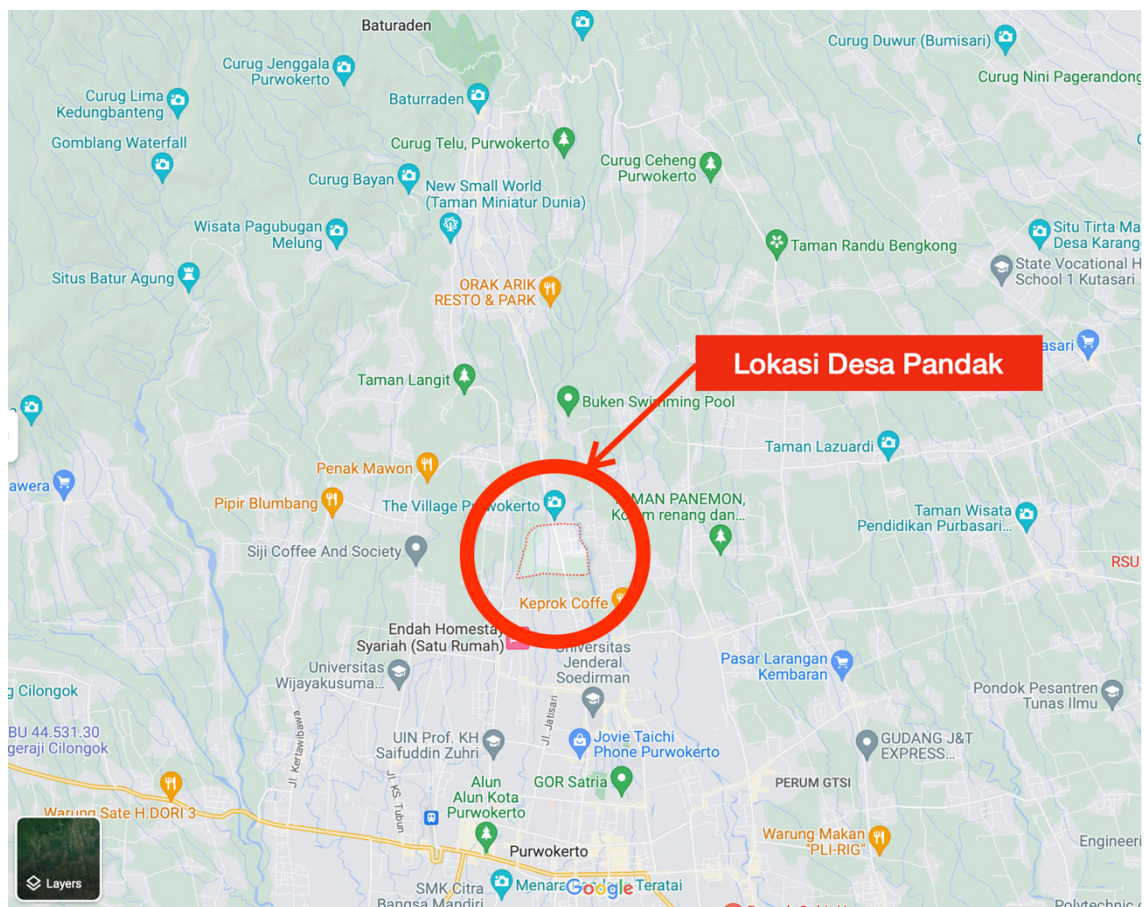
dari kawasan wisata Baturraden di bagian utara, dan berjarak sekitar 6,3 km dari pusat kota Purwokerto di bagian selatan. Secara geografis, seperti yang terlihat dalam gambar 1, posisi Desa Pandak yang berada di tengah antara kawasan wisata dan pusat kota tersebut kurang strategis karena hanya menjadi jalur perlintasan. Karena letaknya yang selama ini kurang strategis, pemerintah Desa Pandak berupaya menggali potensi desa yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

Potensi Desa Pandak bukan terletak pada pertanian, peternakan, atau wisata alam seperti di wilayah Baturaden bagian atas, melainkan dari sisi kerja sama dengan pengusaha untuk menghasilkan proyek sewa tanah khas desa untuk tujuan wisata. Dengan strategi tersebut,

menurut data Pemprov Jateng, sekitar 56% pendapatan asli Desa Pandak mencapai 2,9 miliar rupiah lebih, berbanding 42% sisanya atau 2,2 miliar rupiah berasal dari pusat. Hal ini jauh mengungguli desa lain yang kebanyakan masih mengandalkan kucuran dana dari pusat. Desa Kemutug Lor, misalnya, hanya memiliki pendapatan asli desa sekitar 200 juta rupiah saja atau sekitar 8,7% dari total pendapatan, sementara 91% sisanya atau 2,1 miliar rupiah merupakan anggaran dari pusat (Dispermadesdukcapil Prov. Jateng, 2021). Dengan pendapatan desa yang besar itulah pemerintah Desa Pandak berupaya untuk memenuhi dan meningkatkan ketahanan pangan.

Merujuk pada UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan harus sampai pada level individu. Oleh karena itu, dalam satu rumah tangga, seluruh anggota keluarga harus merasakan kedaulatan, kemandirian, dan keamanan pangan, tidak terkecuali bayi dan

Gambar 1
Lokasi Desa Pandak di antara Kawasan Wisata Baturraden dan Pusat Kota Purwokerto



Sumber: Google Maps, diolah oleh Penulis, 2023.

balita dalam suatu rumah tangga. Karena anak belum mampu mencukupi kebutuhan makannya sendiri, maka orang tua wajib memenuhi ketahanan pangan bayi dan balita. Di Indonesia, tugas ini umumnya diberikan pada ibu sebagai penyedia dan pengolah makan utama dalam rumah tangga. Pada penelitian ini, kuesioner untuk mengukur ketahanan pangan menggunakan kuesioner HFIAS yang dikeluarkan oleh United States Agency for International Development (USAID, 2007).

Penelitian lain yang menggunakan kuesioner HFIAS menunjukkan terdapat hubungan antara ketahanan pangan rumah tangga dengan status gizi anak di bawah dua tahun (Baduta) di Bogor, Indonesia (Utami dan KP, 2015). Penelitian lain turut melaporkan bahwa 37% masyarakat miskin di daerah Cimanggung mengalami rawan pangan tingkat rendah dan 14% rawan pangan tingkat sedang (Wahyudi, 2020). Dalam penelitian ini, hasil *scoring* kuesioner HFIAS yang didapatkan dengan metode wawancara, dapat digolongkan menjadi 4 kategori. Skor 0, tahan pangan; skor 1–2 rawan pangan tingkat rendah, skor 3–7 rawan pangan tingkat sedang, dan skor 8–18 rawan pangan tingkat berat. Namun dalam penelitian ini, kami menggolongkan *scoring* tersebut menjadi 2 kategori, yakni tahan pangan dan rawan pangan.

Variabel keragaman pangan, jika merujuk pada Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS), merupakan pemilihan bahan makanan dari berbagai kelompok pangan seperti kelompok makanan pokok berpati, sayur dan buah, ikan dan daging, telur, kacang-kacangan serta susu dan produk olahannya. Jika skor keragaman pangan masih dalam kategori kurang, artinya kelompok masyarakat masih mengandalkan pangan utamanya pada kelompok makanan

tertentu dan belum mengarah pada diversifikasi pangan. Semakin beragam suatu sumber makanan, akan meningkatkan kecukupan asupan zat gizi dan memenuhi kebutuhan gizi makro maupun mikro. Keragaman pangan merupakan jumlah pangan atau kelompok pangan berbeda yang dikonsumsi individu dalam jangka waktu tertentu (Bilinsky dan Swindale, 2006). Keragaman konsumsi pangan akan mempengaruhi kecukupan zat gizi atau perbaikan gizi. Semakin beragam pangan yang dikonsumsi semakin meningkat kecukupan zat gizinya (Septiani, 2017).

Penilaian keberagaman konsumsi pangan dibedakan menjadi penilaian keberagaman konsumsi pangan pada rumah tangga dan individu. Pada tingkat individu penilaian keberagaman konsumsi pangan menggunakan *Dietary Diversity Score* (DDS) yang diperkenalkan oleh FAO (Septiani, 2017). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan DDS sebagai metode analisis. DDS merupakan suatu alat atau metode yang dikenalkan oleh FAO untuk digunakan dalam melakukan penilaian keragaman konsumsi pangan di tingkat individu. Metode ini sederhana dan efektif untuk mengukur keragaman pangan yang merupakan indikator kualitas asupan gizi seseorang.

Penelitian yang dilakukan oleh Kennedy (2007) menunjukkan bahwa DDS berhubungan dengan asupan zat gizi pada anak tidak ASI usia 2–5 tahun di Filipina. Di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Supriyanti dan Nindya (2015) menyatakan bahwa *Dietary Diversity Score* (DDS) berhubungan dengan status gizi pada balita usia 12–59 bulan di Sumenep. Selain itu, Septiani (2017) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara keragaman konsumsi pangan dengan skor DDS dengan kecukupan zat gizi dengan nilai *Mean Adequacy Ratio* (MAR) pada balita

usia 24–59 bulan. Metode *Dietary Diversity Score* (DDS) dapat digunakan pada berbagai kondisi dengan memperhatikan jangka waktu tertentu.

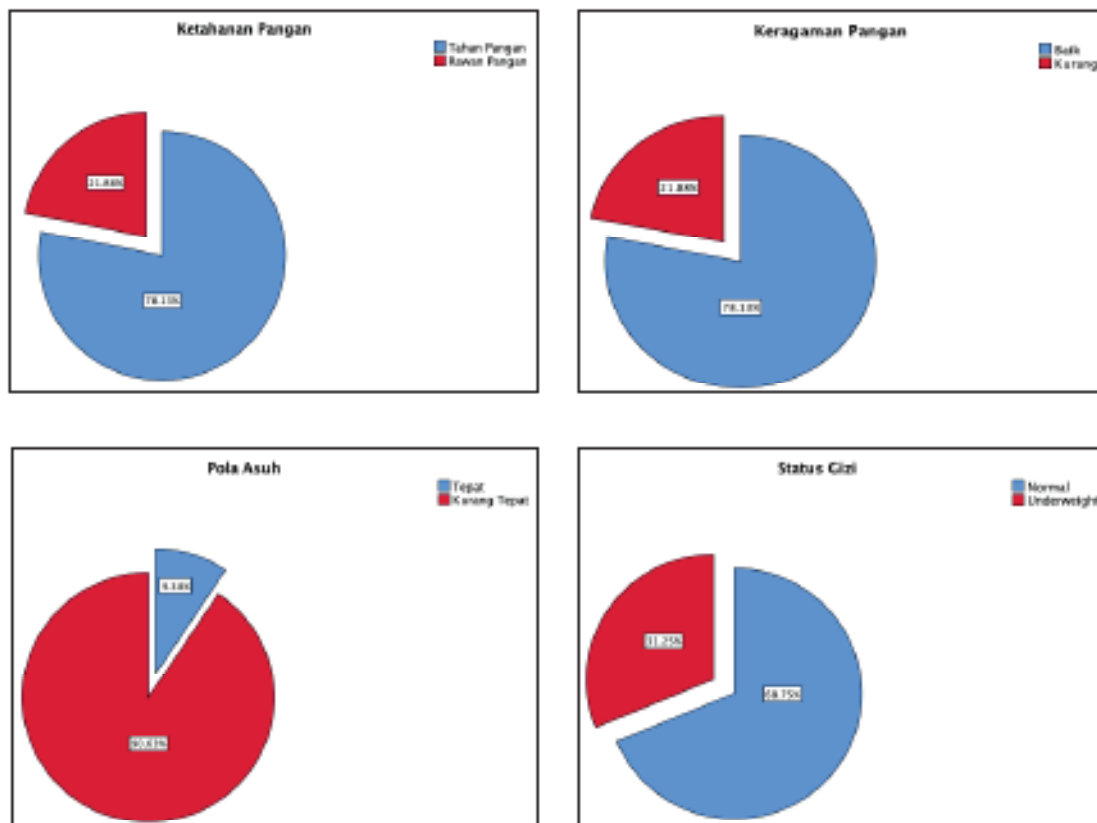
Cara perhitungan *Dietary Diversity Score* (DDS) yaitu jika makanan yang dikonsumsi satu sendok makan atau kurang (<10 g) tidak diberikan skor (FAO, 2011). Misalnya kopi dianggap sebagai jumlah yang sangat kecil, sehingga tidak dihitung pada kelompok susu dan produk susu. Selanjutnya, semua kelompok pangan dijumlahkan dengan kisaran skor 0-9. Semakin tinggi skor tersebut menunjukkan semakin beragam makanan yang dikonsumsi (Mirmiran, dkk., 2004).

Dalam dokumen Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2021-2024 (Kementerian PPN/ Bappenas, 2021), salah satu sektor penting dalam

mewujudkan perbaikan status gizi masyarakat adalah melalui perbaikan pola asuh keluarga. Hal ini menjadi salah satu penyebab dasar di tingkat rumah tangga yang dapat menimbulkan kejadian gizi kurang pada balita. Penelitian yang dilakukan di Aceh menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pola asuh dengan status gizi balita. Ibu dengan pola asuh kurang baik memiliki risiko 3,6 kali lipat lebih besar untuk memiliki balita *underweight* (Masyudi, dkk., 2019). Hasil serupa ditemukan pada penelitian lain, bahwa terdapat 56% balita dengan pola asuh makan yang rendah memiliki status gizi kurang (Pratiwi dkk., 2016).

Dalam kuesioner pola asuh makan yang diterapkan dalam penelitian ini, terdapat 15 pertanyaan yang diajukan pada ibu balita mencakup jenis makanan, jumlah makan, dan

Gambar 2
Distribusi Frekuensi Status Ketahanan Pangan, Keragaman Pangan, Pola Asuh, dan Status Gizi



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2023.

jadwal makan dengan skor kategori jawaban sangat sering (4), sering (3), jarang (2), dan tidak pernah (1). Pola asuh tepat didapatkan jika skor akhir > 55 dan kurang tepat jika skor akhir < 55. Kuesioner pola asuh terkait makan menargetkan ibu balita sebagai narasumber utama. Hal ini dikarenakan tumbuh kembang anak usia dini lebih banyak diawali dari figur ibu, mulai dari masa kehamilan, menyusui, hingga penyedia makanan yang dikonsumsi balita sehari-hari. Periode usia dini membutuhkan ketergantungan tinggi pada orang tua, sehingga kebiasaan makan, jadwal makan, hingga jenis makanan yang dikonsumsi sangat tergantung dari pola asuh yang diterapkan oleh ibu dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 32 ibu balita usia 6–59 bulan menggunakan kuesioner ketahanan pangan, keragaman pangan, pola asuh makan, dan status gizi ditemukan hasil seperti pada gambar 2.

Gambar 2 menunjukkan bahwa masih terdapat 21,88% rumah tangga dengan balita yang mengalami kerawanan pangan dan keragaman pangan kurang, serta sebanyak 31,25% balita mengalami *underweight* (berat badan kurang) berdasarkan BB/U. Faktor yang perlu menjadi fokus utama adalah perbaikan pengetahuan ibu balita mengenai pola asuh, dikarenakan sebagian besar responden (90,63%) memiliki pola asuh terkait makan yang kurang tepat. Hasil kuesioner ini kemudian dianalisis lebih lanjut untuk menguji kekuatan hubungan antarvariabel menggunakan uji *Chi-Square*.

Relasi Ketahanan Pangan, Keragaman Pangan, Pola Asuh, dan Status Gizi di Desa Pandak

Analisis hubungan antarvariabel diperlukan untuk menguji kekuatan relasi

variabel terkait status ketahanan pangan, sehingga penyelesaian masalah di bidang kesehatan ini dapat lebih spesifik dan mengarah pada perbaikan yang optimal. Berikut data-data uji hubungan antara ketahanan pangan, keragaman pangan, pola asuh, dan status gizi responden di Desa Pandak:

Tabel 2
Hubungan Ketahanan Pangan dengan Status Gizi

Status Gizi	Ketahanan Pangan		Total	p-value
	Tahan Pangan	Rawan Pangan		
Normal	20	2	22	0.019
Underweight	5	5	10	
Total	25	7	32	

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2023.

Tabel 1 menunjukkan bahwa ketahanan pangan rumah tangga memiliki korelasi yang signifikan secara statistik dengan status gizi balita, berdasarkan nilai *p-value* 0,019 (signifikansi pada $p < 0,05$). Hal ini dapat dilihat dari 80% balita dengan ketahanan pangan rumah tangga yang baik, memiliki status gizi normal. Sedangkan 71,4% dari balita dengan kondisi rawan pangan dalam rumah tangga, memiliki status gizi *underweight* (berat badan kurang). Hal ini mendukung berbagai teori dan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ketahanan pangan rumah tangga berkaitan erat dengan status gizi balita (Arlis dkk., 2017; Utami dan KP, 2015). Menurut Wahyudi (2020), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan keluarga yaitu pendapatan rumah tangga, pekerjaan, pendidikan kepala keluarga, pendidikan ibu, dan jarak dengan sumber pangan.

Tabel 2 menunjukkan bahwa keragaman pangan yang diberikan pada balita memiliki korelasi yang signifikan secara statistik dengan status gizi balita, berdasarkan nilai

Tabel 3
Hubungan Keragaman Pangan dengan Status Gizi

Status Gizi	Keragaman Pangan		Total	p-value
	Baik	Sedang - Kurang		
Normal	20	2	22	0.019
Underweight	5	5	10	
Total	25	7	32	

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2023.

p-value 0,019. Salah satu studi analisis terhadap hasil Survei Konsumsi Makanan Individu (SKMI) 2014, menemukan bahwa keragaman pangan yang dikonsumsi balita berhubungan erat dengan status gizi balita (Utami dan Mubasyiroh, 2020). Studi ini turut melaporkan bahwa pengaruh etnis memberikan pengaruh terhadap pemilihan bahan makanan di masyarakat Indonesia. Hampir seluruh balita di Indonesia mengonsumsi sereal, akar, dan umbi-umbian karena merupakan makanan pokok di masyarakat. Sedangkan kelompok bahan pangan yang paling sedikit dikonsumsi adalah buah-buahan dan kacang-kacangan. Kondisi ini berbeda dengan Amerika Serikat, di sana anak usia 6–24 bulan yang mengonsumsi buah mencapai lebih dari 80% sejak tahun 2002–2016 (Duffy, dkk., 2019). Anak yang tidak mengonsumsi makanan beragam, memiliki risiko relatif mengalami berat badan kurang sebesar 1,03 (Utami dan Mubasyiroh, 2020). Oleh karena itu, edukasi pada orang tua untuk mengenalkan anak dengan berbagai ragam bahan pangan sejak usia dini penting untuk ditingkatkan.

Tabel 4
Hubungan Pola Asuh dengan Status Gizi

Status Gizi	Pola Asuh		Total	p-value
	Tepat	Kurang Tepat		
Baik	3	19	22	0.53
Underweight	0	10	10	
Total	3	29	32	

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2023.

Tabel 3 menunjukkan bahwa pola asuh pemberian makan yang diterapkan ibu pada balita tidak memiliki korelasi yang signifikan secara statistik dengan status gizi dengan nilai *p-value* 0,53. Temuan ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara pola asuh ibu dengan status gizi balita (Noorhasanah, 2021; Masyudi, dkk., 2019). Hal ini dapat terjadi karena pada responden penelitian ini, 90,6% responden menerapkan pola asuh terkait makan yang kurang tepat. Bahkan balita dengan status BB/U normal pun sebenarnya memiliki pola asuh makan yang kurang tepat, sehingga hasil uji statistik tidak signifikan.

Pola asuh makan balita yang tepat mencakup keragaman konsumsi makanan setiap hari, tapi juga ditunjang dengan porsi makan yang tepat. Jadi, meskipun lauk pauk sayur dan buah beragam, namun jika porsinya tidak sesuai dengan kebutuhan maka asupan tersebut kurang. Contoh, buah dan sayur harus memenuhi porsi anjuran 2–3 porsi sehari, sedangkan lauk nabati dan hewani mencakup 3–4 porsi per hari. Selain itu, pola asuh makan ditunjang dengan pembuatan jadwal makan yang teratur pada anak, yaitu tiga kali sehari makan utama dan satu/dua kali makan selingan setiap hari. Dengan membuat jadwal dan pengaturan makan yang baik, anak memiliki sinyal lapar dan kenyang sehingga membantu anak untuk makan dengan lebih lahap.

Perlu dilakukan pendampingan pola asuh makan yang tepat pada ibu balita, agar kebiasaan baik terkait pemberian makan tepat jumlah dan tepat jadwal dapat dilakukan dengan optimal. Meskipun status gizi balita sudah dalam kategori baik, namun dikhawatirkan porsi makan dan jadwal makan yang tidak teratur dapat berdampak hingga

anak tumbuh lebih dewasa, sehingga dapat meningkatkan risiko masalah gizi di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam implementasi kebijakan yang lebih luas, Desa Pandak harus memiliki strategi untuk mewujudkan tujuan SDGs Desa poin kedua, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan.

Strategi Ketahanan Pangan Desa Pandak

Pemerintahan Desa Pandak berupaya mengatasi efek pandemi Covid-19 dalam hal ketahanan pangan melalui beragam strategi implementasi kebijakan SDGs. Penulis menggunakan model strategi Geoff Mulgan (2009: 4–5) dalam menganalisis strategi pemerintah Desa Pandak dalam mewujudkan SDGs poin kedua mengenai ketahanan pangan, yang di dalamnya terdapat poin pertanian berkelanjutan dan peningkatan gizi balita. Mulgan menggunakan poin-poin sistematis yang perlu diperhatikan pemerintah, yang dalam penelitian ini pemerintahan level desa, yaitu tujuan (*purpose*) dan arah (*directions*), lingkungan (*environments*), tindakan (*actions*), serta pembelajaran (*learning*). Poin pertama, tujuan mengindikasikan mengapa pemerintah desa harus melakukan sesuatu atau kebijakan tertentu, sementara arah menunjukkan apa yang ingin diraih oleh pemerintah desa. Poin kedua, lingkungan, mengindikasikan di mana pemerintah desa meraih tujuannya. Poin ketiga, tindakan, adalah bagaimana mereka meraih tujuan-tujuan yang ada dengan program dan kebijakan yang detail. Poin keempat, pembelajaran, merupakan sistem untuk memahami mana strategi yang berjalan baik dan tidak, serta kebutuhan untuk menganalisis kembali mengenai tujuan dan arah kebijakan pemerintah desa.

Tujuan dan Arah Pemerintah Desa Pandak dalam Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan bertujuan untuk mencukupi ketersediaan pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, agar masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Sementara itu, perbaikan gizi balita bertujuan untuk mencegah kasus kekurangan gizi dan mengatasi kasus *stunting* pada balita. Dua tujuan tersebut secara implisit termasuk dalam visi Desa Pandak yang bertujuan agar “terwujudnya Desa Mandiri menuju masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia”. Pada tahun 2017, Desa Pandak masih mendapatkan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dari pemerintah pusat. Artinya, Desa Pandak masih memiliki status sebagai Desa Tertinggal. Pada tahun 2018 dan 2019, Desa Pandak berhasil naik dengan mendapatkan status sebagai Desa Maju. Pada tahun 2020 sampai 2022, Desa Pandak mendapatkan status Desa Mandiri berdasarkan pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM).

Untuk mempertahankan status sebagai Desa Mandiri, Desa Pandak berupaya melaksanakan tiga strategi pembangunan, yaitu penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, peningkatan sumber daya manusia (SDM) sebagai motor penggerak pembangunan, dan pemanfaatan potensi desa sebagai modal pembangunan. Tiga strategi tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah yang menghambat ketahanan pangan dan perbaikan gizi, seperti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, berkurangnya lahan pertanian, menurunnya produktivitas pertanian tanaman pangan, berkurangnya minat bertani para generasi muda, belum

optimalnya pemenuhan dasar masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta rendahnya kualitas SDM pada angkatan kerja produktif yang diakui Kepala Desa Rujito sebagai tantangan di Desa Pandak. Dengan demikian, tujuan dan arah strategi pemerintah Desa Pandak selaras dengan fokus tujuan SDGs poin kedua tentang upaya menghilangkan kelaparan, upaya menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, serta meningkatkan produktivitas pertanian dan sistem produksi pangan.

Lingkungan dalam Mengelola Ketahanan Pangan

Lingkungan merupakan faktor penting dalam perkembangan perilaku individu. Di masyarakat, perilaku adalah proses interaksi antara manusia dan lingkungan sekitar. Dalam mengelola ketahanan pangan dan perbaikan gizi balita, pemerintah desa adalah aktor utama yang harus berupaya melibatkan lembaga di dalam dan luar desa untuk bersama-sama meningkatkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi balita. Hal itulah yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Pandak. Pemerintah Desa Pandak berperan aktif dalam mendorong Posyandu, memberikan bantuan-bantuan pangan, mendukung sarana agar masyarakat dapat meningkatkan produksi pangan, serta menjalin kerja sama dengan pihak universitas untuk memberikan penyuluhan gizi balita dan sosialisasi pentingnya SDGs bagi desa.

Untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, Desa Pandak bekerja sama dengan SMK Teknas dan STIMIK Widya Utama dalam pemberian beasiswa kepada anak-anak Desa Pandak yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi. Selain itu, Desa Pandak juga membangun gedung PAUD dan TK agar anak-anak Pandak mendapatkan

pendidikan yang memadai. Untuk mencegah *stunting*, Desa Pandak mengoptimalkan peran Posyandu dan lembaga desa lain, sekaligus meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada ibu-ibu hamil dan menyusui, serta ibu-ibu yang memiliki balita tentang gizi dan pola asuh yang sehat. Sosialisasi diberikan oleh para akademisi maupun TPP SDGs Desa agar edukasi berjalan dengan benar sesuai perkembangan ilmu-ilmu terbaru di dunia akademis dan aturan pemerintah.

Dengan beragam kegiatan dan upaya tersebut, pemerintah Desa Pandak berupaya mewujudkan lingkungan yang saling mendukung bagi tata kelola ketahanan pangan dan perbaikan gizi. Seluruh aktor memiliki peran penting, baik itu pemerintah desa, pemerintah pusat, akademisi, posyandu, sekolah-sekolah yang berada di Desa Pandak, maupun masyarakat sendiri.

Tindakan dalam Mengelola Ketahanan Pangan

Pertama, Desa Pandak mempertahankan besaran anggaran untuk ketahanan pangan dan perbaikan gizi. Pada dasarnya, anggaran ketahanan pangan di Desa Pandak masuk dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang dibagi menjadi dua sub bidang, yaitu sub bidang kelautan dan perikanan dan sub bidang pertanian dan peternakan (lihat tabel 5). Pada sub bidang kelautan dan perikanan, pemerintah desa melaksanakan pelatihan penguatan ketahanan pangan budidaya air tawar, sementara pada sub bidang pertanian dan peternakan, pemerintah desa melaksanakan program pelatihan penguatan ketahanan pangan hewani dan tanaman sayur. Masyarakat dibuat berdaya agar menjadi rumah tangga mandiri dengan bantuan bibit ikan, bibit ayam ras, dan bibit

sayuran, lengkap dengan penyediaan kolam, pembuatan kandang, dan pembelian pupuk kandang. Pemerintah Desa Pandak juga melakukan studi banding ke wilayah lain agar masyarakat memperoleh inspirasi dan mampu mengimplementasikan ketahanan pangan.

Kedua, Desa Pandak memasukkan ketahanan pangan sebagai prioritas kebijakan desa, termasuk perbaikan gizi balita di

dalamnya. Jika bidang pemberdayaan masyarakat fokus kepada orang dewasa, maka hal-hal yang terkait perbaikan gizi difokuskan pada ibu dan balita. Selama ini, pemerintah Desa Pandak mengoptimalkan Posyandu dan lembaga kemasyarakatan desa yang lain untuk penanganan *stunting*. Pemerintah Desa Pandak juga membuka ruang bagi para akademisi untuk memberikan penyuluhan atau

Tabel 5
Anggaran Pemerintah Desa Pandak untuk Ketahanan Pangan

736	4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					Rp	225,829,210
737	401		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan					Rp	44,355,000
738	40105		Pelatihan Penguatan Ketahanan pangan Budidaya Ikan Air Tawar						44,355,000
739	40105	52	Belanja Barang dan Jasa						44,355,000
740	40105	521	Belanja Barang Perlengkapan						7,905,000
741	40105	52101	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1	paket	500,000			500,000
742	40105	52105	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1	paket	680,000			680,000
743	40105	52106	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)						5,525,000
744	40105	01	Makan	130	dus	30,000			3,900,000
745	40105	02	Snack	130	dus	12,500			1,625,000
746	40105	52108	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	3	lembar	300,000			900,000
747	40105	52190	Belanja Dokumentasi	1	paket	300,000			300,000
748	40105	522	Belanja Jasa Honorarium						8,400,000
749	40105	52204	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	6	orang	400,000			2,400,000
750	40105	52290	Belanja Honorarium Uang Saku Pelatihan	60	orang	100,000			6,000,000
751	40105	527	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat						28,050,000
752	40105	52701	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat						28,050,000
753	40105	01	Bantuan bibit ikan untuk masyarakat	250	kg	45,000	Rp		11,250,000
754	40105	02	Bantuan pakan ikan	400	kg	7,000	Rp		2,800,000
755	40105	03	Penyediaan kolam	4	bh	2,000,000	Rp		8,000,000
756	40105	04	Pembelian obat-obatan	4	paket	500,000	Rp		2,000,000
757	40105	05	Pembelian peralatan kolam	4	paket	1,000,000	Rp		4,000,000
758	402		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan					Rp	87,925,000
759	40203		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)		Rp	100	persen	Rp	87,925,000
760	40203		Pelatihan Penguatan Ketahanan Pangan Hewani dan Tanaman Sayur						87,925,000
761	40203	52	Belanja Barang dan Jasa						87,925,000
762	40203	521	Belanja Barang Perlengkapan						4,475,000
763	40203	52101	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1	paket	300,000			300,000
764	40203	52105	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1	paket	300,000			300,000
765	40203	52106	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)						2,975,000
766	40203	01	Makan	70	dus	30,000			2,100,000
767	40203	02	Snack	70	dus	12,500			875,000
768	40203	52108	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	2	paket	300,000			600,000
769	40203	52190	Belanja Dokumentasi	1	paket	300,000			300,000
770	40203	522	Belanja Jasa Honorarium						15,200,000
771	40203	52204	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	8	HOK	400,000			3,200,000
772	40203	52290	Belanja Honorarium Uang Saku Pelatihan	120	HOK	100,000			12,000,000
773	40203	527	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat						55,350,000
774	40203	52701	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat					Rp	55,350,000
775	40203	01	Bantuan bibit ayam ras untuk masyarakat	120	ekor	80,000	Rp		9,600,000
776	40203	02	Bantuan penyediaan pakan	300	kg	7,000	Rp		2,100,000
777	40203	03	Bantuan pembuatan kandang	6	bh	4,000,000	Rp		24,000,000
778	40203	04	Pembelian obat-obatan	1	paket	1,000,000	Rp		1,000,000
779	40203	05	Pembuatan tempat pembuatan bibit sayuran	1	bh	15,000,000	Rp		15,000,000
780	40203	06	Pembelian bibit sayuran	1	paket	600,000	Rp		600,000
781	40203	07	Pembelian pupuk kandang	20	ktg	40,000	Rp		800,000
782	40203	08	Pembelian polybek	10	dus	40,000	Rp		400,000
783	40203	09	Pembelian sekam	20	kandi	20,000	Rp		400,000
784	40203	10	Pembelian perlengkapan kandang	1	paket	1,450,000	Rp		1,450,000
785	40203	52790	Studi Banding Pelatihan	1	paket	12,900,000			12,900,000
786									

Sumber: Pemerintah Desa Pandak, 2022

sosialisasi tentang gizi, kesehatan balita, dan pola asuh orang tua. Menurut Kepala Desa Rujito (2022), kolaborasi merupakan kunci untuk membangun desa. Keterlibatan banyak pihak tidak perlu dianggap sebagai hambatan karena merupakan bagian dari proses interaksi di masyarakat.

Pemerintah Desa Pandak telah melakukan berbagai kegiatan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting*, seperti pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting*; konseling gizi; peningkatan kapasitas dan pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia, Kader Posyandu dan pendidik PAUD; peningkatan layanan kesehatan untuk ibu dan anak; penyediaan makanan sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah; serta pendidikan atau penyuluhan tentang pengasuh anak melalui PAUD.

Pembelajaran dalam Mengelola Ketahanan Pangan

Pemerintah Desa Pandak telah menjalankan strategi yang tepat untuk mengelola ketahanan pangan dan perbaikan gizi. Pertama, Desa Pandak telah membuat RPJM Desa yang selaras dengan tujuan SDGs poin kedua. Dengan demikian, rencana pembangunan menjadi lebih terarah dan menunjukkan kesinambungan kebijakan dengan rencana pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Kedua, pemerintah Desa Pandak berupaya menggerakkan seluruh elemen masyarakat di internal dan eksternal pedesaan dalam mencapai tujuan dan arah pengelolaan. Keberhasilan desa dalam berkolaborasi dengan elemen akademis merupakan kunci penting karena kompleksitas persoalan tidak mungkin hanya diselesaikan dengan sumber daya desa saja. Ketiga, pemerintah Desa Pandak konsisten memberikan anggaran yang

cukup besar untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Meskipun pemerintah Desa Pandak telah melakukan berbagai strategi yang tepat, implementasi di lapangan kurang menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya kondisi rawan pangan yang berakibat pada gizi yang kurang. Seperti analisis pada hasil kuesioner, 80% balita memang berada dalam ketahanan pangan rumah tangga yang baik sehingga memiliki status gizi normal. Namun, pengukuran menunjukkan adanya 71,4% balita berada dalam kondisi rumah tangga rawan pangan sehingga memiliki status gizi dan berat badan kurang. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu dioptimalkan untuk mencapai perbaikan status ketahanan pangan keluarga adalah dari segi pendidikan dan pendapatan orang tua. Di sini, pemerintah Desa Pandak perlu meningkatkan edukasi pada orang tua untuk mengenalkan anak dengan berbagai ragam bahan pangan sejak usia dini penting untuk ditingkatkan. Demikian pula dengan pembekalan preventif mengenai risiko menikah muda, yang berpotensi menghasilkan pola asuh yang salah karena kurangnya edukasi menjadi orang tua.

SIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SDGs Desa Pandak dalam mengelola ketahanan pangan belum sepenuhnya optimal. Secara tujuan dan arah, pemerintah Desa Pandak telah menyelaraskan dengan berbagai komponen penting seperti visi dan misi kepala desa, SDGs Desa, serta rencana pembangunan pusat, daerah, dan desa. Pemerintah Desa juga berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif dengan aktif bekerja sama bersama elemen internal dan

eksternal. Tindakan-tindakan pemerintah desa pun menunjukkan beragam program yang disokong anggaran memadai.

Namun, masih adanya rumah tangga rawan pangan dan balita *stunting* di tengah kondisi keuangan desa yang melimpah dan stabil memperlihatkan bahwa pemerintah Desa Pandak masih perlu mengevaluasi implementasi kebijakan SDGs tentang ketahanan pangan yang selama ini dilakukan. Pemerintah Desa Pandak perlu terus mengoptimalkan sosialisasi pencegahan nikah muda, edukasi pemberian makanan gizi seimbang kepada balita, dan pelatihan atau fasilitasi wirausaha warga demi meningkatkan pendapatan keluarga. Semua hal itu berkorelasi dengan ketahanan pangan sebagai salah satu poin SDGs Desa yang paling utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya, D., W.U. Maesyaroh, I.R. Tanjung, dan M. Remayasari, 2021, “Kondisi Tingkat Pengangguran Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Dengan Pendekatan Metode Arima”, dalam *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, Vol. 5, No. 2, hal.1665-1678.
- Ashari, C.R., Khomsan, A. and Baliwati, Y.F., 2019. Validasi Hfias (Household Food Insecurity Access Scale) Dalam Mengukur Ketahanan Pangan: Kasus Pada Rumah Tangga Perkotaan Dan Perdesaan Di Sulawesi Selatan. *Penelitian Gizi dan Makanan (The Journal of Nutrition and Food Research)*, 42(1), pp.11-20.
- Andryanto, S. Dian, 2023, Sri Mulyani: Penurunan Kemiskinan Ekstrem 0 Persen pada 2024, Ini Indikatornya. Diakses di <<https://bisnis.tempo.co/read/1694219/sri-mulyani-penurunan-kemiskinan-ekstrem-0-persen-pada-2024-ini-indikatornya>> pada 8 April 2023>.
- Antara News, 2020, *Dinas: 1.222 pekerja di Banyumas dirumahkan akibat COVID-19*. Diakses di <<https://www.antarane.ws.com/berita/1408258/dinas-1222-pekerja-di-banyumas-dirumahkan-akibat-covid-19>> pada 5 Januari 2023>.
- Arluis, A., T. Sudargo, dan S. Subejo, 2017, “Hubungan ketahanan pangan keluarga dengan status gizi balita (studi di Desa Palasari dan Puskesmas Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang)”, dalam *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 23, No. 3, hal. 359-375.
- Denzin, N. K. and Y. S. Lincoln, 2003, *Collecting and interpreting qualitative materials*, London: SAGE.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020, *Profil Kesehatan 2019*. Diakses di <https://static.banyumaskab.go.id/website/file/website_2705201149115ecd147dc0c6.pdf> pada 20 April 2023>.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2021, *Profil Kesehatan 2020*. Diakses di <https://static.banyumaskab.go.id/website/file/website_25062107294960d5cc3de3e1f.pdf> pada 20 April 2023>.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2022, *Profil Kesehatan 2021*. Diakses di <https://static.banyumaskab.go.id/website/file/website_010422105512624677a06d7ca.pdf> pada 20 April 2023>.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2023, *Profil Kesehatan 2022*. Diakses di <<https://static.banyumaskab.go.id/website/documents/dinkes/2023/Profil%20Kesehatan%20Tahun%202022%20Dinas%20Kesehatan%20Kab.%20Banyumas.pdf>> pada 20 April 2023>.

Arief Bakhtiar Darmawan, Afina Rachma Sulistyoning, Joko Santoso, Tundjung Linggarwati, Kholifatus Saadah, Rahmad Agus Dwianto -- Implementasi Kebijakan SDGs Pemerintah Daerah dalam Mengelola Ketahanan Pangan pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Pandak, Kec. Baturaden, Kab. Banyumas)

- Dispermadesdukcapil Prov. Jateng, 2021, *Kependudukan Kabupaten Banyumas*. Diakses di <<https://sidesa.jatengprov.go.id/kabupaten/33.02> pada 4 Januari 2023>.
- Duffy, E.W., Kay, M.C., Jacquier, E.F., Catellier, D., Hampton, J., Anater, A.S. and Story, M., 2019. Trends in food consumption patterns of US infants and toddlers from Feeding Infants and Toddlers Studies (FITS) in 2002, 2008, 2016. *Nutrients*, 11(11), p.2807.
- FAO, 2008, *An Introduction to the Basic Concepts of Food Security*. Diakses di <<https://www.fao.org/3/al936e/al936e00.pdf> pada 24 Januari 2023>.
- FAO, 1996, *Report of the World Food Summit, 13-17 Nopember 1996*. Diakses di <<https://www.fao.org/3/w3548e/w3548e00.htm> pada 4 Januari 2023>.
- FAO & WHO, 1992, *World Declaration and Plan of Action for Nutrition Rome, December 1992*. Diakses di <<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/61051/a34303.pdf?sequence=1&isAllowed=y> pada 15 Mei 2023>.
- Focus Group Discussion (FGD), 2022, “Upaya Melokalkan SDGs: Strategi Kabupaten Banyumas dalam Mengelola Desa” di RM Red Chilli, Banyumas, pada hari Selasa, 11 Oktober 2022.
- Iskandar, Halim A, 2020, *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri RI, 2018, *Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- Kementerian PPN/ Bappenas RI, 2023, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2. Tanpa Kelaparan*. Diakses di <<https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-2/> pada 21 Juli 2023>
- Kementerian PPN/ Bappenas RI, 2021, *Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep.124/M.PPN/HK/10/2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024*. Diakses di <<https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/2804> pada 17 Maret 2023>
- Kennedy, Gina L, Maria R. Pedro, Chiara Seghieri, Guy Nantel, & Inge Brouwer, 2007, “Dietary diversity score is a useful indicator of micronutrient intake in non-breast-feeding Filipino children”, dalam *J Nutr*; No. 137, hal. 472–477.
- Khomsan, Ali, Hadi Riyadi, & Sri Anna Marliyati, 2013, “Ketahanan Pangan dan Gizi serta Mekanisme Bertahan pada Masyarakat Tradisional Suku Ciptagelar di Jawa Barat”, dalam *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, Vol. 18, No. 3, hal. 186-193.
- Masyudi, M., Mulyana, M. and Rafsanjani, T.M., 2019. Dampak pola asuh dan usia penyapihan terhadap status gizi balita indeks BB/U. *AcTion: Aceh Nutrition Journal*, 4(2), pp.111-116.
- Mirmiran, Parvin, Leila Azadbakht, Ahmad Esmailzadeh, & Fereidoun Azizi, 2004, “Dietary diversity score in adolescents - a good indicator of the nutritional adequacy of diets: Tehran lipid and

- glucose study”, dalam *Asia Pacific J Clin Nutr*, Vol. 13, No.1, hal. 56–60.
- Mulgan, Geoff, 2009, *The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for the Common Good*, New York: Oxford University Press Inc. https://books.google.co.id/books?id=GZh2z6wZ-asC&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Nagari, R.K. dan T. S. Nindya, 2017, “Tingkat Kecukupan Energi, Protein Dan Status Ketahanan Pangan Rumah Tangga Berhubungan Dengan Status Gizi Anak Usia 6-8 Tahun”, dalam *Amerta Nutrition*, Vol. 1, No. 3, hal.189-197.
- Noorhasanah, E. and Tauhidah, N.I., 2021. Hubungan pola asuh ibu dengan kejadian *stunting* anak usia 12-59 bulan. *Jurnal Ilmu Keperawatan Anak*, 4(1), pp.37-42.
- Pamuji, Tangkas, 2022, *Sebagian Desa di Lima Kecamatan Masuk Kemiskinan Ekstrem, Ini Kecamatannya*. Diakses di <<https://radarbanyumas.disway.id/read/70249/sebagian-desa-di-lima-kecamatan-masuk-kemiskinan-ekstrem-ini-kecamatan-pada-6-Februari-2023>>.
- Pemerintah Desa Pandak, 2022, “Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Pandak Tahun 2022.”
- Pratama, Dian, Roso Witjaksono, dan Alia Bihrajihant Raya, 2022, “Partisipasi Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Dalam Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari Mendukung Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Kabupaten Gunungkidul DI Yogyakarta”, dalam *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 28, No. 1, hal. 19-37.
- Pratiwi, T.D., Masrul, M. and Yerizel, E., 2016. “Hubungan pola asuh ibu dengan status gizi balita di wilayah kerja Puskesmas Belimbing Kota Padang”, *Jurnal Kesehatan Andalas*, Vol. 5, No. 3, hal. 661-665.
- Presiden Republik Indonesia, 2020, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang “Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional”*, Jakarta: Kesekretariatan Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: Kesekretariatan Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia, 2012, *UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*, Jakarta: Kesekretariatan Negara Republik indonesia.
- Rujito, Rujito, 2022, “Strategi Menjadi Desa Mandiri Desa Pandak Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas,” hasil wawancara pribadi, 7 September 2022.
- Septiani, Andini, 2017, *Sensitivitas dan Spesifitas Dietary Diversity Score (DDS) dalam Mengestimasi Tingkat Kecukupan Zat Gizi pada Balita Usia 24-59 Bulan di Indonesia*, Skripsi, Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Swindale, A. dan Bilinsky, P., 2006, *Household dietary diversity score (HDDS) for measurement of household food access: indicator guide*, Washington, DC: Food and Nutrition Technical Assistance Project, Academy for Educational Development.
- United States Agency for International Development (USAID). 2007.

- Arief Bakhtiar Darmawan, Afina Rachma Sulistyoning, Joko Santoso, Tundjung Linggarwati, Kholifatus Saadah, Rahmad Agus Dwianto -- Implementasi Kebijakan SDGs Pemerintah Daerah dalam Mengelola Ketahanan Pangan pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Pandak, Kec. Baturaden, Kab. Banyumas)
- Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS) for Measurement of Food Access: Indicator Guide. Version 3.* Diakses di <https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/eufao-fsi4dm/doc-training/hfias.pdf> pada 4 Januari 2023>.
- Utami, N.H. and Mubasyiroh, R., 2020. Keragaman makanan dan hubungannya dengan status gizi balita: Analisis Survei Konsumsi Makanan Individu (SKMI). *Gizi Indonesia*, 43(1), pp.37-48.
- Wahyudi, T.W., 2020, *Ketahanan Pangan Masyarakat Miskin di Kecamatan Cimanggung*, Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Zain, Fadhlun Mukhtar, 2021, *Banyumas Masuk Daerah dengan Kemiskinan Ekstrem, Ini Kata Bupati*. Diakses di <<https://regional.kompas.com/read/2021/10/12/113207278/banyumas-masuk-daerah-dengan-kemiskinan-ekstrem-ini-kata-bupati>> pada 4 Februari 2023>.
- Zulkifli, Zulkifli, 2022, "Peran Komando Kewilayahan dalam Membantu Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pangan (Studi Kampung Moibaken dan Kampung Suneri di Kabupaten Biak Numfor)", dalam *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 28, No. 2, hal. 256-275.